

RENCANA KERJA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025**



KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan Anggaran Tahun 2025, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapainya dalam Tahun 2025 mendatang.

Dokumen ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini akan bermanfaat, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Sumber, 22 Agustus 2024

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.....	21
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
III.1 Telaah Kebijakan Nasional	25
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	29
III.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
IV.1 Target Kinerja.....	30
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Anggaran Tunai (SAT) yang lebih menenkankan pada penggunaan sumber daya dan dana (Input). diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi dan memperimbangkan berbagai kebijakan Nasional. Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk dengan unsur Legislatif (DPRD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sejumlah peraturan

Perundangan. Peraturan Daerah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah :
 1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025.

2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Sistematika Rencana Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan Tahun ini

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan Rencana Kerja yang dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Pada pelaksanaannya memang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 terlampir.

1. Realisasi Program/Kegiatan

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Mei Tahun 2024, adapun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Capaian Program dan Kegiatan
s/d Bulan Mei Tahun 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2024	
		Target	Capaian
(2)	(3)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Persen	25,81 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	7 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	102 Orang/Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7 dokumen	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16.000 Dokumen	4000 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	4 jenis	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	268 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	10 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	36 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	17 Unit
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Persen	30 Persen
	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	12,3 Persen	
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,2 Persen	

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	133 Orang	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Perangkat Daerah	-
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	175 orang	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Dokumen	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,41 Persen	1,37 Persen
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	245 orang	
	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	
	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Dokumen	110 Dokumen
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	90 Persen	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	30 Orang
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Orang	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0,81 Persen	0,13 Persen

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan	100 orang	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	-
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	138 orang	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Persen	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	tersedianya buku data terpilah gender dan anak	120 Buku	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Dokumen	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2,4 Persen	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	635 Dokumen	70 Dokumen
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Persen	100 Persen
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	360 orang	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	58 layanan	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	58 Orang	21 Orang
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	tersediannya informasi data keluarga	100 persen	41,65 Persen
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 bulan	

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	5 Laporan
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	32 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25,4 Persen	2,42 Persen
	Peningkatan CU/PUS	75,4 Persen	73,66 Persen
	Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang	290 Orang
	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB	7 Kampung KB
	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20,2 Tahun	20,19 tahun
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	69 Laporan	-
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	40 Laporan	10 Laporan
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210 Laporan	60 Laporan
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	73 Dokumen	24 Dokumen
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	26 Organisasi
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	3.300 Orang	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.300 Orang	1100 Orang
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	424 Organisasi	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB Baru	87.100 orang	

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	1 Laporan
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.300 Orang	4310 Orang
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	400 Laporan	-
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang	130 Orang
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	855 Orang	130 Orang
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	10 Kampung KB	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	-
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	3 Kampung
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57,88 Persen	30,90 Persen
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.872 Anggota	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	-
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	-
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	32 Laporan	2 Laporan
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	10 Kelompok	8 Kelompok
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	-
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	-

Jika dilihat dari tabel diatas, terdapat beberapa program/kegiatan yang belum mencapai target, hal tersebut disebabkan karena masih berjalannya pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Diharapkan pada akhir tahun semua target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan kurang memuaskan jika dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab II.1 bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik permasalahan internal maupun eksternal, adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan			100	100	100	100	92	93	94	95	
2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun			7	7	7	7	7	7	7	7	
3	Buku RENSTRA dan RENJA			3	3	2	2	3	3	3	3	
4	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi			4	4	4	4	4	4	4	4	

	kinerja SKPD											
5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Badan/ Dinas			1	40	40	40	1	1	1	1	
6	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun			3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan			80	80	80	80	80	80	100	100	
8	Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Tersusunnya buku laporan keuangan Semesteran			1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor			6	7	7	7	6	6	6	6	
13	Jumlah alat-alat listrik yang tersedia			11	11	11	11	6	6	6	6	
14	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			9	9	9	9	6	6	6	6	
15	Tersedianya kebutuhan barang cetakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
16	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			8	16000	16000	16000	16000	16000	6400	6400	
17	Tersedianya Aktivitas Adminitrasi Perkantoran			20	20	20	20	18	20	20	20	
18	Tersedianya makanan dan minuman			2	2	2	2	2	2	2	2	
19	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			156	156	160	160	150	160	1	1	
20	Jumlah petugas penatausahaan arsip dinas			3	3	3	3	3	3	3	3	
21	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	

22	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			3	3	3	3	3	3	3	3	
23	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan			268	268	268	268	279	279	279	279	
24	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas jabatan			70	70	70	70	78	78	78	78	
25	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas operasional			161	161	161	161	161	161	161	161	
26	Tersedianya gedung kantor UPT DPPKBP3A			40	40	40	40	40	40	40	40	
27	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan			25	25	25	25	25	25	25	25	
28	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian			11,7	11,9	12,1	12,3	11,5	12	12	12,1	
29	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan			35,8	35,9	36,1	36,2	35,9	36,1	36,1	36,2	
30	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender			133	133	133	133	133	133	133	133	
31	Peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender			33	133	133	133	133	133	133	133	
32	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina			175	175	175	175	175	175	175	175	
33	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina			45	45	45	45	45	45	45	45	
34	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			160	160	160	160	160	160	160	160	
35	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			160	300	300	300	300	300	300	300	
36	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan			1,29	1,33	1,37	1,41	0,8	1	1	1,1	

37	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			245	245	245	245	245	245	245	245	
38	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			92	6	6	6	6	6	6	6	
39	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			6	6	6	6	6	6	6	6	
40	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			245	245	245	245	245	245	245	245	
41	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			92	6	92	92	6	92	92	92	
42	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			6	6	6	6	6	6	6	6	
43	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu			70	75	80	80	75	80	80	80	
44	Jumlah korban dan anggota gugus tugas yang terfasilitasi pelayanan terpadu			70	75	80	80	75	80	80	80	
45	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian			0,83	0,82	0,82	0,81	0,82	0,82	0,81	0,80	
46	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
47	Jumlah Kelompok Perempuan yang dibina (Kumulatif)			100	100	100	100	100	100	100	100	
48	Peserta mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR (Kumulatif)			100	100	100	100	100	100	100	100	

49	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan pelayanan komprehensif			138	138	138	138	138	138	138	138	
50	Jumlah peserta yang terbina			138	138	138	138	138	138	138	138	
51	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender			100	100	100	100	100	100	100	100	
52	Tersedianya buku data terpilah gender dan anak			120	120	120	120	120	120	120	120	
53	Buku Data Terpilah Statistik Gender dan Anak			120	120	120	120	120	120	120	120	
54	Presentase anak yang mendapat perlindungan			1,94	2,1	2,28	2,4	2,1	2,28	2,40	2,45	
55	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga			1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	
56	Jumlah keluarga yang mendapatkan akses parenting keluarga			50	50	50	50	50	50	50	50	
57	jumlah tayangan iklan layanan masyarakat tentang pola asuh anak			7	7	7	7	7	7	7	7	
58	Jumlah anggota lembaga/instansi/ organisasi yang berpartisipasi dalam kabupaten Layak Anak			100	635	635	635	635	635	635	635	
59	Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE			100	100	100	100	100	100	100	100	
60	Jumlah layanan korban kekerasan			100	100	100	100	100	100	100	100	
61	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			250	300	360	360	300	360	360	360	
62	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			250	300	360	360	300	360	360	360	
63	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan			40	40	48	58	40	48	48	58	
64	Jumlah layanan korban kekerasan			40	40	48	58	40	48	48	58	
65	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			96	96	115	138	96	115	115	138	

66	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			96	96	110	110	96	110	110	110	
67	tersediannya informasi data keluarga			100	100	100	100	100	100	100	100	
68	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga			12	12	12	12	12	12	12	12	
69	Pelaksanaan Pengumpulan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan data anggota keluarga			100	12	12	12	12	12	12	12	
70	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	24,2	24,2	25,2	25,3	25,4	25,2	25,3	25,3	25,4		
71	Peningkatan CU/PUS	72,8	72,8	75	75,2	75,4	75	75,2	75,2	75,4		
72	Jumlah pendidik/Motivator sebaya			340	340	340	340	340	340	340	340	
73	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status			10	10	10	10	10	10	10	10	
74	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	18,20	19,2	20	20,1	20,2	20	20,1	20,1	20,2		
75	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE			40	40	40	40	40	40	40	40	
76	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan			40	40	40	40	40	40	40	40	
77	Terlaksananya Manajemen dan Media KIE Bantuan Operasional Keluarga Berencana			100	6	6	6	6	6	6	6	
78	Tersediannya anggaran operasional keluarga berencana untuk kecamatan di kabupaten Cirebon			1	40	40	40	40	40	40	40	
79	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan			1	3177	3250	3300	3177	3250	3250	3300	

80	Tersedianya anggaran untuk kader PPKBD dan Sub PPKBD se Kabupaten Cirebon			1	3177	3250	3300	3177	3250	3250	3300	
81	Jumlah peserta KB Baru			86802	86900	8700	87100	86900	8700	8700	87100	
82	Terlaksananya pendistribusian alokon			1	5	5	5	5	5	5	5	
83	Jumlah Peserta KB yang dilayani			7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	
84	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor dan Perlatan Gedung Kantor			4	4	5	5	4	5	5	5	
85	Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi			400	400	400	400	400	400	400	400	
86	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi KHIBA			855	855	855	855	855	855	855	855	
87	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan			10	10	10	10	10	10	10	10	
88	Jumlah Kampung KB yang dibina			10	10	10	10	10	10	10	10	
89	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB			56,98	57,24	57,52	57,88	57,24	57,52	57,52	57,88	
90	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL			72722	72722	72822	72872	72722	72822	72822	72872	
91	Tersedianya Sarana dan Prasarana Stunting			2	2	2	2	2	2	2	2	
92	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Pendampingan untuk kegiatan bina bina			10	10	10	10	10	10	10	10	

Dari hasil capaian tersebut diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 3 indikator kinerja yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Kunci diantaranya adalah :

- a. Peningkatan jumlah akseptor MKJP
- b. Peningkatan CU/PUS
- c. Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan

Hasil capaian kinerja tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang capaiannya kurang maksimal karena permasalahan permasalahan yang

sudah dijelaskan pada sub bab II.1, besar harapan untuk kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaan program/kegiatan. Memiliki misi “menurunkan kesenjangan sosial kependudukan” Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi isu-isu sosial kependudukan yang ada, diantaranya adalah :

- a. Rendahnya keikutsertaan ber-KB;
- b. Tingkat kesejahteraan keluarga;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Ketahanan Keluarga;
- e. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Laju pertumbuhan penduduk;
- g. Angka Kelahiran;
- h. Partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- i. Peningkatan status Kampung KB.

Dengan melihat beberapa isu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang muncul pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan isu-isu yang harus dituntaskan secara bersama-sama baik dengan lintas sektoral maupun dengan masyarakat secara langsung.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja 2025 tidak lepas dari proses perencanaan RKPD yang dituangkan di dalam Rencana Strategis 2019-2024. Pada langkah awal penyusunan Rencana Kerja 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan telaah terhadap RKPD yang sudah disusun dengan kebutuhan program/kegiatan dengan menyesuaikan pagu

anggaran yang sudah disediakan. Terdapat beberapa kegiatan yang memang urgensinya sangat tinggi dan rendah, hal tersebut dilakukan berdasarkan prioritas kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.

Pada proses penyesuaian ini ditemukan beberapa catatan penting dalam rencana anggaran 2025, dengan masih tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak, rendahnya keikutsetaan KB pria, rentang usia perkawinan pertama yang masih rendah, peningkatan Kabupaten Layak Anak, menekan angka perceraian dengan memperkuat ketahanan keluarga, masih tingginya angka kelahiran pada setiap keluarga dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil dari telaah diatas, maka pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan hasil catatan tersebut, adapun review perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 15 Pebruari 2024, dengan mengundang OPD pada lingkup sosial. Adapun hasil yang diperoleh dari Forum Perangkat Daerah tersebut adalah bagaimana peran penting koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dicapai dengan baik.

Pada pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lepas dari peran serta masyarakat. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Cata tan
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kec. Klangeran	Rp 49.999.800,00	PIK
			Kec. Waled	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Kaliwedi	Rp 50.000.000,00	
			Kec. Plumbon	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Jamblang	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Talun	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Gunungjati	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Weru	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Palimanan	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Pabedilan	Rp 50.000.000,00	
			Kec. Ciledug	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Susukan Lebak	Rp 20.332.800,00	
			Kec. Dukupuntang	Rp 25.000.000,00	
			Kec. Sedong	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Beber	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Gebang	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Plered	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Panguragan	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Kedawung	Rp 30.000.000,00	
			Kec. Pasaleman	Rp 25.000.000,00	
			Kec. Depok	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Gegecik	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Karangsembung	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Arjawinangun	Rp 49.999.800,00	
			Kec. Babakan	Rp 50.000.000,00	
			Kec. Karangwareng	Rp 50.000.000,00	
			Kec. Lemahabang	Rp 25.000.000,00	
Kec. Losari	Rp 49.999.800,00				
Kec. Greged	Rp 50.000.000,00				
Kec. Gempol	Rp 25.000.000,00				
Kec. Astanajapura	Rp 50.000.000,00				
Kec. Suranenggala	Rp 50.000.000,00				
Jumlah				Rp 1.424.329.400,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Kedawung	Rp 5.000.000,00	PIK
			Kec. Sumber	Rp 29.346.200,00	
			Kec. Gegecik	Rp 29.346.200,00	
Jumlah				Rp 63.692.400,00	

Usulan tersebut merupakan hasil dari ajuan langsung dari 32 Kecamatan dengan menysasar langsung pada Prioritas Daerah No. 4. Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaah Kebijakan Nasional

Berdasarkan namanya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Masing-masing urusan didasari oleh rencana atau kebijakan pada kementerian masing masing.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO;
- c. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.

- 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).

- 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Dengan melihat kebijakan nasional diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kapasitas perempuan dalam kehidupan politik sosial dan budaya
 1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan politik
- b) Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat
 1. Peningkatan Pendapatan Perempuan
- c) Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
 1. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
- d) Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif

1. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
- e) Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak
 1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak untuk keluarga yang berkualitas
 2. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 3. Efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- f) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
 1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- g) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Dinas DPPKBP3A
- h) Memperbanyak kampung KB
 1. Meningkatkan 8 (delapan) fungsi keluarga
- i) Melaksanakan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan
 1. Mensinergikan program lintas sektoral
- j) Meningkatkan kegiatan TRIBINA dan UPPKS
 1. Menghasilkan update data keluarga
- k) Mensosialisasikan sekolah berwawasan Kependudukan
 1. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang
- l) Mengadakan kajian Kependudukan
 1. Tersusunnya buku kajian kependudukan
- m) Memantapkan peserta KB aktif diatas 60%
 1. Meningkatkan kegiatan KIE
 2. Meningkatkan peserta KB MKJP
 3. Meningkatkan peserta KB Pria
 4. Menekan Peserta KB Istirahat
- n) Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan pertama diatas 20 tahun
 1. Meningkatkan Program PUP
 2. Menurunkan PUS <20 tahun

3. Meningkatkan Program KB-KR

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menetapkan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

- 1.1 Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga
- 1.2 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- 1.3 Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan
- 2.1 Nilai LKIP DPPKBP3A

III.3 Program Dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam perumusan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun periode 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

- 1.1 Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga
- 1.2 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan

- 1.3 Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan
- 2.1 Nilai LKIP DPPKBP3A

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 pada tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Target Kinerja

a. Tujuan & Sasaran

Dalam rangka menyukseskan visi dan misi kepala daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Ketimpangan Gender	$IKG = 1 - \frac{HARM(Gp,Gl)}{Gp,l}$	Persen	0,48
	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Total Fertility Rate	$TFR = 5 \sum ASFRi$	Poin	2,18
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = 1/3 (Ipar + IDM + Lin-Dist)$	Persen	73,25
	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindung	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani} / \text{Jumlah Anak (732.736)}}{100\%}$ $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan} / \text{jumlah penduduk perempuan (1.193.263)}}{x}$	Persen	0,55

			100.000		
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan		Nilai Sakip	5 (Lima) unsur penilaian SAKIP : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	Persen	69
	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	-	Persen	70,70

b. Program dan Kegiatan

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, maka sebagai pendukung disusun pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
0	NON URUSAN			21.015.948.800,00
0.00.	NON BIDANG URUSAN			21.015.948.800,00
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A	90,2 Persen	21.015.948.800,00
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2 Dok	90.590.800,00
0.00.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.014.800,00
0.00.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.628.000,00
0.00.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45.948.000,00
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dok	19.346.300.500,00

0.00.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	19.325.675.000,00
0.00.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.065.200,00
0.00.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.560.300,00
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dok	34.000.000,00
0.00.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.000.000,00
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	1 Dok	784.747.700,00
0.00.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.914.000,00
0.00.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	369.089.000,00
0.00.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.389.500,00
0.00.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.000 Dokumen	79.000.000,00
0.00.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	148.372.800,00
0.00.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66.132.100,00
0.00.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	83.850.300,00
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dok	73.413.000,00
0.00.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	73.413.000,00
0.00.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	148.583.500,00
0.00.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	177.813.000,00
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	120 Dok	360.500.300,00
0.00.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120 Unit	114.597.800,00

0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	29.177.500,00
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	212.225.000,00
0.00.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.978.352.700,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.112.411.000,00
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,5 Persen	2.121.547.800,00
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bimtek PPRG pada Lembaga Pemerintah	3 Dok	55.760.400,00
2.08.02.2.01.000 8.	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	33 Perangkat Daerah	55.760.400,00
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok perempuan yang terbina	4 persen	74.580.400,00
2.08.02.2.02.000 1.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	74.580.400,00
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	1.991.207.000,00
2.08.02.2.03.000 3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1.991.207.000,00
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,39 Persen	304.848.000,00
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pencegahan kekerasan	50 Lembaga	125.252.800,00

2.08.03.2.01.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	125.252.800,00
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	178 Orang	152.804.100,00
2.08.03.2.02.000 1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	108 Orang	124.054.100,00
2.08.03.2.02.000 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Layanan	28.750.000,00
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	50 Dok	26.791.100,00
2.08.03.2.03.000 1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	7.403.100,00
2.08.03.2.03.000 3.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	200 Orang	5.788.000,00
2.08.03.2.03.000 4.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	13.600.000,00
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentas Angka Perceraian di Kabupaten Cirebon	1,04 Persen	227.313.800,00
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga pada 100 KK Binaan	3 Dok	143.240.600,00
2.08.04.2.01.000 3.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	143.240.600,00
2.08.04.2.03.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	703 Orang	84.073.200,00

2.08.04.2.03.000 1.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	703 Layanan	84.073.200,00
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kelengkapan penyajian data terpilah gender yang memenuhi standar	1 Dokumen	90.161.200,00
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data gender dan anak yang disajikan	1 Dok	90.161.200,00
2.08.05.2.01.000 1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	90.161.200,00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak	65 Persen	368.540.200,00
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan	100 Persen	368.540.200,00
2.08.06.2.02.000 1.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.500 Orang	54.256.100,00
2.08.06.2.02.000 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	310.251.100,00
2.08.06.2.02.000 3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.033.000,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.865.941.700,00
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,9 Persen	738.069.400,00
		Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	22,4 Tahun	170.007.000,00
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian	Tersedianya Dokumen GDPK & Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan	2 Dok	221.485.700,00

	Kuantitas Penduduk			
2.14.02.2.01.000 2.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	15.500.000,00
2.14.02.2.01.000 9.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	150 Sekolah	19.942.400,00
2.14.02.2.01.001 9.	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	16 Kegiatan	150.064.600,00
2.14.02.2.01.002 3.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kegiatan	35.978.700,00
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dok	686.590.700,00
2.14.02.2.02.001 2.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	586.898.300,00
2.14.02.2.02.001 5.	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	145 Unit	99.692.400,00
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	75,6 Persen	4.809.294.900,00
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi	75 ORANG	4.444.343.500,00
2.14.03.2.02.000 6.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	75 Laporan	4.444.343.500,00
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	70 Fasyankes	192.053.200,00
2.14.03.2.03.000 3.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.200 Orang	130.000.000,00

2.14.03.2.03.000 8.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	62.053.200,00
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	pemberdayaan dan peningkatan serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	16 ORGANISASI	172.898.200,00
2.14.03.2.04.000 1.	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	16 Organisasi	95.598.000,00
2.14.03.2.04.000 6.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55 Kampung	77.300.200,00
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	92 persen	148.570.400,00
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 LAPORAN	148.570.400,00
2.14.04.2.01.002 1.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	73.570.400,00
2.14.04.2.01.002 6.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	120 Kelompok	75.000.000,00
J U M L A H				29.994.301.500,00

c. Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentu terdapat skala prioritas didalamnya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah

menentukan program prioritas yang bertujuan untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,5 Persen	2.121.547.800,00
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bimtek PPRG pada Lembaga Pemerintah	3 Dok	55.760.400,00
2.08.02.2.01.0008.	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	33 Perangkat Daerah	55.760.400,00
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok perempuan yang terbina	4 persen	74.580.400,00
2.08.02.2.02.0001.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	74.580.400,00
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	1.991.207.000,00
2.08.02.2.03.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1.991.207.000,00
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,39 Persen	304.848.000,00
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pencegahan kekerasan	50 Lembaga	125.252.800,00
2.08.03.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	125.252.800,00
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	178 Orang	152.804.100,00

2.08.03.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	108 Orang	124.054.100,00
2.08.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Layanan	28.750.000,00
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	50 Dok	26.791.100,00
2.08.03.2.03.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	7.403.100,00
2.08.03.2.03.0003.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	200 Orang	5.788.000,00
2.08.03.2.03.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	13.600.000,00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak	65 Persen	368.540.200,00
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan	100 Persen	368.540.200,00
2.08.06.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.500 Orang	54.256.100,00
2.08.06.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	310.251.100,00
2.08.06.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.033.000,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.865.941.700,00
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,9 Persen	738.069.400,00
		Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	22,4 Tahun	170.007.000,00
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dok	686.590.700,00

2.14.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	586.898.300,00
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	75,6 Persen	4.809.294.900,00
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	70 Fasyankes	192.053.200,00
2.14.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.200 Orang	130.000.000,00
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	pemberdayaan dan peningkatan serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	16 ORGANISASI	172.898.200,00
2.14.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55 Kampung	77.300.200,00
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	92 persen	148.570.400,00
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 LAPORAN	148.570.400,00
2.14.04.2.01.0021.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	73.570.400,00
2.14.04.2.01.0026.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	120 Kelompok	75.000.000,00
J U M L A H				29.994.301.500,00

BAB V

P E N U T U P

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam meningkatkan peranan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja Tahun 2025. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon bersiap diri menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Rencana Kinerja inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Catatan penting yang perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan sukses dilaksanakan apabila terdapat dukungan baik internal maupun eksternal yaitu SKPD terkait dengan bidang sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ini mendapat hasil yang maksimal. Selain hal tersebut, pentingnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hal- hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Sumber, 22 Agustus 2024
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003